ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DIY TAHUN 2007-2013

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Indah Nur Yuliana

Nomor Mahasiswa : 12313076

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2016

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY

Tahun 2007-2013

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Indah Nur Yuliana
Nomor Mahasiswa	: 12313076
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2016

Penulis



Indah Nur Yuliana

NIM : 12313076

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DIY TAHUN 2007-2013

Nama	: Indah Nur Yuliana
Nomor Mahasiswa	: 12313076
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 30 September 2016

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DIY TAHUN 2007-2013

Disusun Oleh : **INDAH NUR YULIANA**

Nomor Mahasiswa : **12313076**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 16 November 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si .....

Penguji : Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D. .....

Indah Susantun, Dra., M.Si. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada AllAH SWT atas rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Kepada Papah, Mamah, Adik, Eko Susanto, dan Seluruh Keluarga Besar

Yang telah mendukung dan memberi masukan berupa Do'a serta Nasihat, dan segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan yang selalu dipanjatkan kepadaku.

Kupersembahkan juga karya ini kepada seluruh teman seperjuangan dan teman yang berada jauh di Samarinda yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

"Jika kamu menolong (Agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu".

(Q.S Muhammad: 7)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Allah engkau berharap"

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

"Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain".

(William Wordsworth)

"Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya"

"Sekecil apapun itu, jika kita telah berusaha sebaik-baiknya dengan segala kemampuan kita, di tengah keterbatasan untuk memperbaiki keadaan, itu termasuk salah satu perjuangan untuk lebih baik"

" YA ALLAH if someone hates me for my happiness, I ask You that You send them happiness so that they forget mine :) "

"JOGJA adalah saksi mata, jutaan sarjana yang diwisuda"

(Najwa Shihab)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY Tahun 2007-2013"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan,motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarata yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.
4. Papah, Mamah tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, kehangatan dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa, saya ucapkan banyak terima kasih.
5. Adik kesayangan, untuk semua dukungan serta semangat yang sangat bermanfaat, semoga kakak bisa menjadi panutan yang baik.
6. Eko Susanto dan keluarga besar, yang selalu mendukung dalam Do'a serta semangat yang tiada hentinya untuk ini semua.

7. Teman- teman jurusan ilmu ekonomi FE UII, terimakasih atas sumbangan saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini Semoga amal baik kalian dapat menjadi kebaikan untuk hari yang akan datang.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 September 2016

Indah Nur Yuliana

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahaan Skripsi iii

Halaman Berita Acara Ujian Skripsi..... iv

Halaman Persembahaan v

Halaman Motto vi

Halaman Kata Pengantar vii

Halaman Daftar Isi ix

Halaman Daftar Gambar xiii

Halaman Daftar Tabel xiv

Halaman Abstrak xv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan dan Manfaat 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 13

2.1. Kajian Pustaka 13

2.2. Landasan Teori 16

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 16
2.2.1.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 17
2.2.1.2. Sumber- Sumber PAD 18
2.2.2. Pengertian Jumlah Penduduk 21
2.2.3. Pengertian PDRB 22
2.2.4. Pengertian Pengeluaran Pemerintah 27
2.2.5. Pengertian Investasi 32
2.2.5.1 Jenis-Jenis Investasi 32
2.3. Hubungan Variabel Penelitian 34
2.3.1. Hubungan PAD dengan Jumlah Penduduk 34
2.3.2. Hubungan PAD dengan PDRB 35
2.3.3. Hubungan PAD dengan Pengeluaran Pemerintah 35
2.3.4. Hubungan PAD dengan Investasi 36
2.4. Hipotesis Penelitian 38
BAB III. METODE PENELITIAN 39
3.1. Jenis dan Sumber Data 39
3.2. Variabel Penelitian 39
3.3. Definisi Operasional 39
3.4. Metode Analisis 40
3.4.1 Estimasi Regresi Data Panel 42
3.4.1.1. Metode Common Effects Model/PLS 42

3.4.1.2. Metode Fixed Effects Model/FEM 44
3.4.1.3 Metode Random Effects Model/REM 45
3.5. Pemilihan Model 46
3.5.1.Uji Statistik F/ Chow Test..... 46
3.5.2. Uji Hausman 48
3.5.3. Uji Statistik 49
3.5.3.1 Koefisien Determinasi R^2 49
3.5.3.2 Uji t 50
3.5.3.3 Uji F 51
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS 52
4.1. Hasil dan Analisis 53
4.1.1. Pemilihan Model Regresi 53
4.1.1.1 Chow Test 53
4.1.1.2 Hausman Test..... 54
4.1.2 Estimasi Fixed Effects Model..... 55
4.1.3. Hasil Uji Statistik..... 58
4.1.3.1. Hasil Uji t..... 58
4.1.3.2. Hasil Uji F..... 59
4.1.3.3. Koefisien Determinasi R^2 60
4.1.4. Interpretasi Hasil 60
4.1.5. Analisis Ekonomi 61

4.1.5.1. Jumlah Penduduk 61

4.1.5.1.1 Jumlah Wisatawan 62

4.1.5.2. PDRB 62

4.1.5.3. Pengeluaran Pemerintah..... 63

4.1.5.4. Investasi 65

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 67

5.1. Simpulan 66

5.2. Implikasi dan Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Variabel Penelitian 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013..... 6

Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 7

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Chow Test 54

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Hausman Test 55

Tabel 4.3 Hasil Uji Fixed Effects Model 56

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Intersep di Kabupaten/Kota 57

Tabel 4.5 Kesimpulan Hasil Uji t Statistik 59

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi adalah mencapai masyarakat adil, makmur dan merata. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri jalannya kepemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran kepemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang disebut otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan Data Panel dari Tahun 2007-2013 dengan menggunakan model *Fixed Effects.* Hasil penelitian adalah jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD. PDRB dan investasi berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Tetapi secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Wisatawan, *Fixed Effects*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan utama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia adalah mencapai masyarakat adil, makmur dan merata. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri jalannya kepemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran kepemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang disebut otonomi daerah.

Tujuan terpenting dalam pembangunan ialah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagipula untuk mewujudkannya pemerintah harus esktra kerja keras dengan melaksanakan tugasnya. Pembangunan dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia, pemerintah seharusnya memberikan pengabdian dan peran serta langsung kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pemerintahan sentralistik kurang tepat di Indonesia, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999, ini merupakan langkah awal untuk mengganti sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi (Suparmoko, 2001).

Menurut undang-undang otonomi, setiap daerah tingkat I/ provinsi dan daerah tingkat II/kabupaten diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini tidak semua urusan diserahkan kepada daerah namun ada hal-hal tertentu yang diurus oleh pemerintah pusat salah satunya adalah masalah pertahanan keamanan. Setiap daerah diyakini mengetahui bagaimana daerahnya harus dibangun dan dikembangkan menurut sumber daya yang dimiliki baik untuk sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. (Suparmoko, 2002).

Prinsip pemberian otonomi daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah, hal ini bertujuan langsung dengan pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat didaerahnya. Kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa setiap pemerintah daerah otonomi, harus dapat membiayai seluruh keperluannya yang bersumber dari PAD. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa: bagi hasil pajak,

bukan pajak, sumbangan, dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta pinjaman daerah (Bintoro, 1998).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pelaksanaan pembangunan daerah mengacu kepada pemerataan pembangunan dalam meningkatkan pendayagunaan potensi suatu daerah yang dimiliki. Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sumber-sumber pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih teliti dan cukup pintar dalam mengelola keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik apabila PAD dioptimalkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu dampak dari kebijakan yang harus dilaksanakan. Bagi suatu daerah indikator ekonomi penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai untuk arus pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator yang seringkali digunakan dalam melihat sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah adalah aspek ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai penopang kekuatan dan kelemahannya (Sukirno, 2004).

PDRB diartikan sebagai nilai barang atau jasa yang diproduksi didalam suatu negara dalam satu tahun tertentu, barang dan jasa yang diproduksi bukan saja milik perusahaan melainkan oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di suatu negara tersebut (Sukirno, 2004). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Adanya peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Penduduk berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang yang dikonsumsi. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses *intern* perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari *ekstern* dan bersifat sementara atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1998).

Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang tinggi, sehingga untuk mendorong laju pertumbuhan perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah. Ada tiga faktor komponen utama dalam pertumbuhan dari

setiap bangsa yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Todaro, 2000).

Provinsi DIY adalah salah satu provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, sejauh ini provinsi DIY terdiri dari 5 kabupaten/kota. DIY terletak di bagian Selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. DIY memiliki luas 3.185,80 km^2 ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km^2 (BPS, 2010).

Provinsi DIY mengalami kemajuan pesat dari segi pendapatan asli daerahnya, sebagian besar pendapatan tersebut dihasilkan dari sumber-sumber yang mempengaruhinya seperti pajak, retribusi dan lain-lain yang telah disahkan, daerah yang cukup potensial antara lain Kabupaten Sleman, Kota Yogya dan Kabupaten Bantul, tetapi yang mengalami potensi kontribusi PAD paling besar di Provinsi DIY ialah Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1 menunjukkan Kabupaten Sleman menghasilkan PAD sebesar Rp. 449.270.306 juta, hal ini dikarenakan kabupaten Sleman merupakan kabupaten/kota yang serba ada meliputi pariwisata, agro bisnis (kafe/pertokoan), dan pendidikan. Sehingga disini terjadi transaksi ekonomi yang secara tidak langsung pengaruhnya dapat meningkatkan PAD di Provinsi DIY itu sendiri.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013
(ribu Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	95.991.513
2.	Bantul	224.197.864
3.	Gunung Kidul	83.427.448
4.	Sleman	449.270.306
5.	Kota Yogyakarta	383.052.140

Sumber: BPS DIY

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 kabupaten/kota yang memberikan peranan relatif besar dalam pembentukan PDRB Provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp 7.471.898 milyar. Dilihat dari potensi kabupaten/kota, penyumbang terbesar terhadap total PDRB DIY, merupakan daerah konsentrasi dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran maupun jasa-jasa lainnya. Setiap harinya menghasilkan output yang akan berpengaruh terhadap pendapatan di Provinsi DIY. Adanya peningkatan PDRB antar kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DIY.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000
(juta Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	2.062.182
2.	Bantul	4.645.476
3.	Gunung Kidul	3.825.350
4.	Sleman	7.471.898
5.	Kota Yogyakarta	6.498.900

Sumber: BPS DIY

Menurut teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Pengeluaran investasi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta merupakan prasyarat bagi kegiatan ekonomi guna meningkatkan produksi nasional. Investasi

merupakan salah satu faktor produksi yang peranannya sangat dominan dalam peningkatan produksi sebagaimana tercermin melalui laju pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal diperoleh dari tabungan dan investasi yang disisihkan dari bagian pendapatan waktu sekarang untuk dapat memperbesar produksi dan pendapatan dimasa yang akan datang. ”Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk membeli modal dan membina industri” (Sukirno, 2000).

Negara yang sedang berkembang dengan tingkat pendapatan yang masih relatif rendah menyebabkan tingkat investasi dalam negeri yang tercemin dalam penanaman modal dalam negeri dan tabungan domestik juga masih relatif kecil sehingga banyak sumber-sumber daya alam yang sebenarnya pontensial belum digunakan secara optimal. Penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam karena diperlukan investasi baru dan penggunaan modal yang besar.

Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sebagian besar pengeluaran daerahnya. Suryono (2008) mengemukakan agar tugas pemerintahan yang diamanatkan oleh otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dibutuhkan sumber keuangan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu indikator turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pengembangan penerimaan daerah dengan intensifikasi hanya dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi. Peningkatan sumber pendapatan tersebut bertujuan

agar daerah memiliki dana yang besar untuk membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penulis memilih Provinsi DIY karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor PAD yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota terhadap Provinsi DIY. Maka peneliti mengangkat judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI DIY DI TAHUN 2007-2013".**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
2. Manganalisis pengaruh faktor PDRB terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
3. Menganalisis pengaruh faktor pengeluaran pemerintah terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
4. Menganalisis pengaruh faktor investasi terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai PAD di kabupaten/kota provinsi DIY, serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia .
2. Bagi pemerintah dan pihak terkait, penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi yang terkait guna meningkatkan PAD di kabupaten/kota provinsi DIY di masa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang PAD di kabupaten/kota provinsi DIY.
4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pedokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kemudian teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul sebagai hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sehingga dapat ditarik benang merah dan implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau studi yang pernah dilakukan, adapun kajian pustaka yang telah dijadikan pertimbangan adalah:

Santosa dan Rahayu (2005), melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma. Variabel-variabel yang digunakan adalah pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Variabel penduduk yang mempunyai pengaruh paling besar.

Adriani (2008), melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis regresi liniear berganda dengan persamaan *double logaritma.* Variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk tidak signifikan tehadap PAD Kabupaten Merangin.

Satriya (2009), melakukan penelitian dengan alat analisis *Error Correction model* (ECM). Variabel-variabel yang digunakan yaitu investasi, produk domestik

regional bruto perkapita, inflasi, dan pengeluaran pemerintah. Hasil uji ECM menunjukkan bahwa jangka panjang variabel investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel inflasi dan PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Purwaningsih (2011), melakukan penelitian dengan alat analisis regresi linier berganda. Variabel-variabel yang digunakan adalah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif, dan variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Atmaja (2011), melakukan penelitian dengan alat analisis regresi linier berganda (OLS). Variabel-variabel yang digunakan adalah pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh terhadap PAD.

Maulyana (2012), melakukan penelitian dengan alat analisis deskriptif dan verifikatif menggunakan regresi linear berganda. Variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB, pengeluaran pemerintah, optimalisasi pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh, sedangkan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

Gitaningtyas (2014), melakukan penelitian dengan alat analisis regresi linear berganda dengan metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel secara

acak. Variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB, jumlah penduduk, dan Investasi Swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap PAD.

Kusuma (2014), melakukan penelitian dengan alat analisis *Fixed Effect Models* (FEM). Variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD. Sedangkan inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD. Hasil pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap PAD.

Asmuruf (2015), melakukan penelitian dengan alat analisis regresi linear berganda (OLS). Variabel-variabel yang digunakan adalah PDRB dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong.

Variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi akan digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut paling banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain itu variabel-variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah dilarang melakukan hal sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah berasal dari:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Bagian Laba Usaha Daerah,
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.2.1.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang termasuk dalam retribusi daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksana pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2.1.2 Sumber-sumber PAD

a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Adapun ciri-ciri pajak daerah yaitu:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam hal hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, laba perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah tersebut. Tentu didalam pengelolaan perusahaan harus bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip ekonomi secara umum yaitu efektivitas dan efisiensi. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai "suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan ekonomi daerahnya dan menambah penghasilan suatu daerahnya". Kutipan tersebut terdapat dua fungsi pokok yaitu :

1. Sebagai dinamisator perekonomian daerah, yaitu daerah tersebut harus mampu memberikan perkembangan dalam perekonomian daerahnya.

2. Sebagai hasil pendapatan daerah, yaitu sebagai suatu perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis, sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada daerah, pada dasarnya perusahaan daerah bukan berorintasi pada profit akan tetapi berorientasi dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain perusahaan daerah tetap harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain yaitu :

1. Jasa Giro
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.2.2 Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Kuncoro (2012) penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari 2 kelompok yaitu: pertama, penduduk yang bekerja memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Kedua, penduduk yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan (termasuk mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan).

Menurut Budiharjo (2003) jumlah penduduk yang besar dalam perencana pembangunan dipandang sebagai *asset* modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai *asset* apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Menurut Widodo (1990) pengkajian tentang peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, merupakan hal yang mendasar untuk diungkapkan mengingat jumlah penduduk adalah subyek pembangunan ekonomi. Pemupukan modal/investasi laju pertumbuhan ekonomi, volume ekspor dan

PDRB, menjadi kurang berarti jika tidak mengikutsertakan peran serta penduduk dalam pembangunan ekonomi.

2.2.3 Pengertian PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah di suatu daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar perhitungannya.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB/Produk Domestik Nasional Bruto (PDNB) tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar/lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi tersebut terjadi atau tidak.

Menurut Novita (2016) pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh PDRB. PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Menurut BPS (2013) PDRB dihasilkan oleh 9 sektor yaitu:

(1) sektor pertanian,

(2) sektor pertambangan dan penggalian,

(3) sektor industri dan pengolahan,

(4) sektor listrik, gas dan air bersih,

(5) sektor bangunan,

(6) sektor perdagangan, hotel dan restaurant,

(7) sektor angkutan dan komunikasi,

(8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

(9) sektor jasa jasa.

Perhitungan pendapatan nasional hanya memakai konsep domestik. Berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah (provinsi atau kabupaten atau kotamadya) dimasukkan tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Sehingga PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Pendapatan regional (PDRB) menunjukan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka akan mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat cenderung mendorong perluasan

lahan untuk perumahan, selain itu juga akan mendorong pembangunan industri, perkantoran, dan infrastruktur lainnya (Kapantow, 2015).

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menurut harga konstan, laju PDRB akan meningkatkan output perkapita dalam jangka panjang. Kemampuan pengelolaan pembangunan ekonomi yang baik di suatu daerah maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nilai PDRB dihasilkan oleh masing-masing daerah tergantung potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi (faktor produksi) di daerah tersebut.

Nilai PDRB yang dihasilkan pada tiap-tiap daerah mengalami perbedaan dikarenakan kepemilikan SDA, kondisi infrastruktur serta peranan investor terhadap kapasitas produksi sangat besar di tiap-tiap daerah, maka investasi sendiri penggerak perekonomian baik dari segi penambahan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi (Novianto, 2013). Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perhitungan PDRB menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan produksi

   Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu yang dikelompokkan menjadi sembilan (9) sektor yaitu: a) Pertanian, b) Pertambangan dan Penggalian, c) Industri Pengolahan, d) Listrik, Gas, dan Air Bersih, e) Kontruksi, f) Perdagangan, Hotel dan Restoran, g) Pengangkutan dan Komunikasi, h) Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan, i) Jasa-Jasa.

2. Pendekatan pengeluaran

   Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi: Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan pendapatan

   Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi yaitu: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Menurut sumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS

Provinsi DIY terhadap perhitungan PDRB menurut penggunaannya sebagai berikut:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)

   Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun.

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G)

   Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan.

Menurut (BPS), PDRB dibagi atas dasar harga, yaitu: atas dasar harga belaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan digunakan sebagai perencanaan dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa konsep PDRB yang perlu diketahui:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar
2. Produk Domestik Regional Neto atas Dasar Harga Pasar

3. Produk Domestik Regional Neto atas Dasar Biaya Faktor
4. Pendapatan Regional
5. Pendapatan Regional Perkapita
6. Produk Domestik dan Produk Regional
7. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.

2.2.4 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Mangkoesoebroto (2008) perkembangan pengeluaran pemerintah dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Model Pembangunan

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke

pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menjelaskan peran pemerintah sangat besar dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Pengeluaran pemerintah menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak ketika masyarakat tidak ingin membayar

pajak yang tinggi, yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan sebagai fasilitator, tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk administrasi pembangunan dan kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (1994) meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Menurut Sadono Sukirno (2000) pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, dimana kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

   Merupakan belanja dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.Belanja pegawai yang dimaksud rincian belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, perusahaan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

   Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menujang kelancaraan mekanisme sistem pemerintah, serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsug dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (Rustiono, 2008).

Pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, diantaranya menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

2.2.5 Investasi

Menurut Sunariyah (2003) Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang.

Menurut Novianto (2013) Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya.

2.2.5.1 Jenis Investasi

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihandana. Menurut Sunariyah (2004) investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu:

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil *(riil asset)* berupa aktiva berwujud seperti : emas, perak, intan, barang-barang seni.
2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga *(financial asset)* berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Investasi Langsung *(Direct Investment)*

   Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah *go public* dengan harapan akan mendapat keuntungan berupa penghasilan dividen dan *Capital Gains.*

b. Investasi Tidak Langsung *(Indirect Investment)*

   Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi *(Company Investment)* yang berfungsi sebagai perantara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 Pasal 1 angka 9 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan pekerjaan
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari Dalam Negeri (DN) maupun dana yang berasal dari Luar Negeri (LN)
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Investasi, baik yang bersumber dari DN dan LN tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi, dan merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan.

2.3 Hubungan Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan PAD dengan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi akan tetapi hubungan keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap daerah, dengan demikian setiap daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono, 1998).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri penambahan penduduk yang tinggi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi (Wirosardjono, 1998).

Penambahan penduduk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan akan meningkat.

2.3.2 Hubungan PAD dengan PDRB

PDRB merupakan fungsi dari PAD karena hubungan ini merupakan hubungan yang fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan, dan akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas. (Santosa dan Rahayu, 2005)

2.3.3 Hubungan PAD dengan Pengeluaran Pemerintah

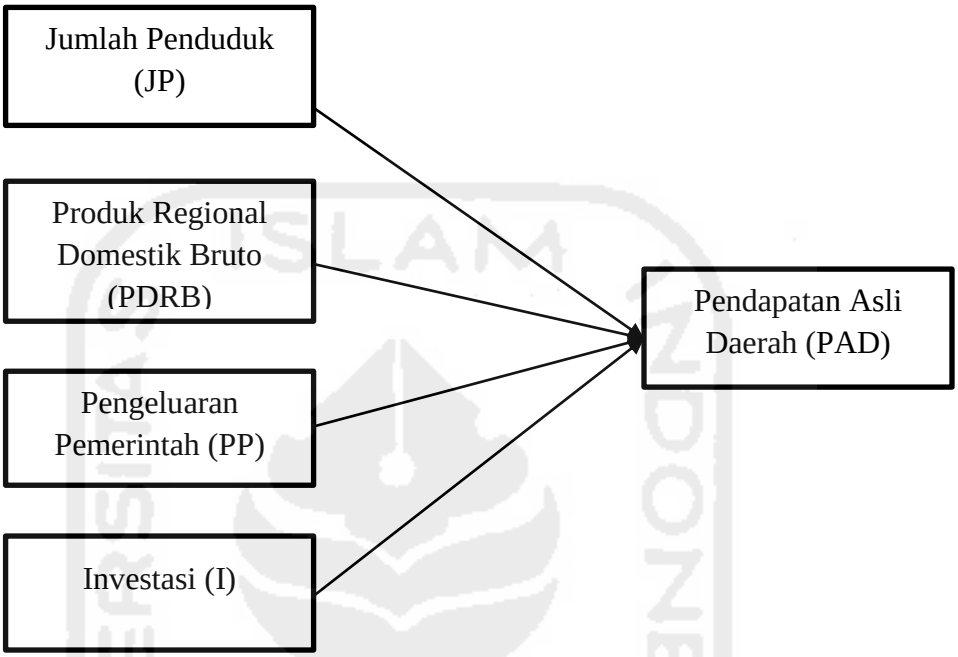
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai fasilitator sehingga membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur. Anggaran belanja tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat

kegiatan ekonomi (Sukirno, 1994). Meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

2.3.4 Hubungan PAD dengan Investasi

Investasi merupakan salah satu ujung tombak dalam menggerakkan roda perekonomian, karena perannya yang dominan dalam memperlancar pembangunan. Sehingga perlu ditingkatkan pengelolaanya, baik dari segi perencanaan, promosi, pelayanan, pengawasan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon investor sehingga minat para investor untuk menanamkan modalnya semakin meningkat. Tingginya minat investasi sehingga minat investasi sangat kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PAD berhubungan dengan investasi maka secara otomatis meningkatkan jumlah perdagangan, hotel dan restoran serta pengembangan tempat-tempat wisata yang menunjukkan masih besarnya minat investor untuk berinvestasi yang pada akhirnya meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Secara teori disebutkan bahwa tingkat pendapatan nasional atau pendapatan daerah yang tinggi karena besarnya pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan akan mendorong dilakukannnya lebih banyak investasi (Sukirno, 2004).

Gambar 2.1
Hubungan Variabel Penelitian



Penelitian ini PAD dipengaruhi oleh: jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi. Adanya faktor-faktor tersebut, maka hal ini mampu membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah dengan baik dan melaksanakan pembangunan daerah yang mengacu kepada pemerataan pembangunan dalam meningkatkan pendayagunaan potensi suatu daerah yang dimiliki (Sukirno, 2004).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai landasan teori yang di kemukakan, merupakan salah satu kesimpulan dan argumentasi yang sifatnya sementara benar, sehingga dalam hal ini membutuhkan data-data hasil penelitian agar dapat dicari kebenarannya dan ditarik konsekuensi logis. Dalam penjelasan dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

1) Variabel jumlah penduduk diduga berpengaruh positif terhadap PAD.
2) Variabel PDRB diduga berpengaruh positif terhadap PAD.
3) Variabel pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh positif terhadap PAD.
4) Variabel investasi diduga berpengaruh positif terhadap PAD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam angka), literatur-literatur yang membahas mengenai materi penelitian yang bersangkutan.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: variabel dependen, dan variabel independen. Dalam penelitian ini PAD sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari Tahun 2007-2013.

3.3 Definisi Operasional

Berdasarkan variabel–variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen, terdiri sebagai berikut:

1. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (BPS, 2013). Satuan yang digunakan adalah ribu rupiah.
2. Jumlah Penduduk adalah banyaknya penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang bertempat tinggal dan menetap di masing-masing kabupaten/kota Provinsi DIY (BPS, 2013). Satuan yang digunakan adalah jiwa.
3. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di masing-masing kabupaten/kota se-provinsi DIY berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000 (BPS, 2013). Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.
4. Pengeluaran Pemerintah adalah total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan membeli barang dan jasa di masing-masing kabupaten/kota se-provinsi DIY (BPS, 2013). Satuan yang digunakan adalah ribu rupiah.
5. Investasi adalah jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang ada di setiap kabupaten/kota se-provinsi DIY (BPS, 2013). Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (*Pooled Data*). Sriyana (2014) menjelaskan, data panel adalah gabungan antara data rentang waktu (*time*

series) dan data antar/lintas unit (*cross section*). Menurut Widarjono (2009) keuntungan menggunakan data panel ialah untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua *time series* dan *cross section* sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar, dengan menggunakan data panel peneliti akan dimudahkan dan diuntungkan dalam menganalisis data, keuntungan tersebut yaitu :

1). Jumlah observasi data yang besar

2). Meningkatnya derajat bebas

3). Berkurangnya kolinearitas antar variabel-variabel penjelas

4). Meningkatnya efisiensi dari penafsiran ekonometris

5). Estimasi parameter lebih stabil

Menganalisis data dengan regresi, yaitu dengan menggunakan bantuan program *Eviews* 7.1. Variabel independen yaitu jumlah penduduk (X1), produk domestik regional bruto (X2), pengeluaran pemerintah (X3), dan investasi (X4). Variabel dependen yang digunakan yaitu PAD (Y).

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

PAD = *f* (X1, X2, X3, X4)

Persamaan yang digunakan yaitu:

$$\mathbf{Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}}$$

Keterangan:

Y adalah PAD (ribu rupiah)

X_1 adalah jumlah penduduk (jiwa)

X_2 adalah PDRB (juta rupiah)

X_3 adalah pengeluaran pemerintah (ribu rupiah)

X_4 adalah investasi (juta rupiah)

α adalah konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefesien regresi

e adalah *standart error*

i adalah kabupaten/kota

t adalah tahun

Berdasarkan formulasi diatas maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X1, X2, X3, X4).

3.4.1 Estimasi Regresi Data Panel

3.4.1.1 Metode *Common Effects* Model/*Pooled Least Square* (PLS)

Menurut Sriyana (2014) Asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan metode *common effects/* PLS adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu (n) yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya akan memberikan nilai intersep maupun slope yang

sama besarnya. Begitupula dengan waktu (t), nilai intersep dan slope dalam persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel-variabel independenya adalah sama untuk setiap waktu. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regersi data panel ini yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya.

Sistematika model *common effects* adalah menggambungkan antara data *time series* dan data *cros-section* ke dalam data panel *(pooled data).* Dari data tersebut kemudian di regresi dengan metode OLS, dengan melakukan regresi semacam ini maka hasilnya tidak dapat mengetahui perbedaan baik antar individu maupun antar waktu disebabkan oleh pendekatan yang digunakan menggabaikan dimensi individu maupun waktu yang mungkin saja memiliki pengaruh

Regresi model *commom effects* ini berasumsi bahwa intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu, adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (*error* atau *residual*). Dalam persamaan matematis asumsi tersebut dapat dituliskan β_0 (slope) dan β_k (intersep) akan sama (konstan) untuk setiap data *time series* dan *cross section*. Persamaan matematis untuk model *common effects* akan mengestimasi β_1 dan β_k dengan model berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k}^{n} =_1 \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

i adalah banyaknya observasi (1,2,...,n)

t adalah banyaknya waktu (1,2,....t)

n x t adalah banyaknya data panel

ε adalah residual

3.4.1.2 Metode *Fixed Effect* Model (FEM)

Model (*fixed effects*) adalah suatu regresi yang menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama (Sriyana, 2014). Ada 2 asumsi yang ada dalam model regresi (*fixed effects*) yaitu:

1. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit

   Intersep pada suatu hasil regresi sangat mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu, pada pendekatan (*fixed effects*) metode dapat dilakukan dengan variabel semu (*dummy*) untuk menjelaskan adanya perbedaan antar intersep. Model ini dapat di regresi dengan teknik *Least Squares Dummy Variabels* (LSDV)

2. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu, Pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu obyek analisis maupun antar waktu, namun slope masih diasumsikan konstan/sama.

Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^{j} + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i D_i + U_{it}$$

i = 1,...,N dan t = 1,...,K

Keterangan :

Y_{it} adalah variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

α_i adalah intersep yang berubah – ubah antar unit cross section

X_{it}^{j} adalah variabel bebas ke-j diwaktu t untuk unit cross section i

β_j adalah parameter untuk variabel bebas ke-j

U_{it} adalah komponen error di waktu t untuk unit cross section i

Keputusan memasukan variabel (D_i) pada pendekatan *fixed effects* tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3.4.1.3 Metode *Random Effect* Model (REM)

Model ini lebih dikenal sebagai model *Generalized Least Squares* (GLS). Model ini di asumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan residual atau *error*, sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Karena hal inilah, model efek acak *(random effects)* sering juga disebut model komponen *error (error component model)* (Sriyana, 2014). Ada 2 asumsi yang digunakan dalam model *random effects* (REM) adalah :

1. Intersep dan slope berbeda antar individu, pada asumsi ini intersep dan slope yang di analisis hanya dilihat dari perbedaan antar obyek antar individu saja,

adanya perbedaan intersep dan koefisien regresi berdasarkan perubahan waktu masih dikesampingkan

2. Intersep dan slope berbeda antar individu/unit dan periode waktu, asumsi ini menjelaskan adanya perbedaan hasil estimasi intersep dan slope yang di analisis terjadi karena perbedaan antar obyek individu analilsis sekaligus karena adanya perubahan antar periode waktu.

3.5 Pemilihan Model

Untuk menguji serta memilih kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga metode pada teknik estimasi model dengan data panel digunakan Chow *Test* dan Hausman *Test*. Chow *Test* digunakan untuk menguji kesesuaian model antara model yang diperoleh dari data *common effects* atau *pooled least square* (PLS) dengan model yang diperoleh dari metode *fixed effects*. Selanjutnya Hausman *Test* dilakukan terhadap model yang terbaik yang diperoleh dari hasil *Chow Test* dengan model yang diperoleh dari metode *random effects.*

3.5.1 Uji Statistik F atau Chow *Test*

Menurut Iqbal (2015) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effects* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode c*ommon effects*.

Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *common effects*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effects*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : model *common effects* atau PLS

H_1 : model *fixed effects*

Uji F statistik untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effects* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy (*common effects*) dengan melihat *sum of squared* (RSS).

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/m}{(RSS_2)/(n-k)}$$

Keterangan :

RSS_1 adalah residual sum square hasil pendugaan FEM

RSS_2 adalah residual sum square hasil pendugaan PLS

n adalah jumlah data cross section

m adalah jumlah data time series

k adalah jumlah variabel penjelas

Statistik Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (m, n, k) apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effects*. Sebaliknya,

apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *common effects*.

3.5.2 Hausman *Test*

Hausman *test* adalah pengujian statistik untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effects* atau *random effects*. Uji Hausman didasarkan pada kedua metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan GLS konsisten, tetapi OLS tidak efisien di dalam hipotesis nol. Di lain pihak hipotesis alternatifnya metode OLS konsisten, dan GLS tidak konsisten oleh sebab itu hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. *Hausman Test* dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0: *random effects models* (REM)

H_1: *fixed effects models* (FEM)

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan Uji Hausman dan membandingkan dengan *Chi-Square*. Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak *k*. Dimana *k* adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka menolak hipotesis nol dan model yang tepat adalah model *fixed effects* sebaliknya ketika nilai Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka gagal menolak hipotesis nol dan model yang tepat adalah *random effects* (Widarjono, 2013).

3.5.3 Uji Statistik

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap variabel dependen yaitu PAD.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2, semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2013). Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

1. Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2, maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2, maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
2. Untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi, atau untuk mengukur besar kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y.

3.5.3.2 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

a. Variabel jumlah penduduk.

H0 : $\beta 1 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap variabel PAD

H1 : $\beta 1 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap variabel PAD

b. Variabel PDRB.

H0 : $\beta 2 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel PDRB terhadap variabel PAD

H1 : $\beta 2 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel PDRB terhadap variabel PAD

c. Variabel pengeluaran pemerintah.

H0 : $\beta 3 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap variabel PAD

H1 : $\beta 3 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap variabel PAD

d. Variabel Investasi.

H0 : $\beta 4 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD

H1 : $\beta 4 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t kritis, maka H0 ditolak maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t kritis maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009).

3.5.3.3 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009). Hipotesis yangdigunakan :

H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = \beta 4 = 0$

H1: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α (0,05=5%), jika prob f-stat < α maka menolak H0 maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat > α maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, yang terdiri dari kabupaten/kota se-Provinsi DIY, dengan tahun pengamatan yang teliti pada tahun 2007-2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi, sedangkan untuk variabel dependen yaitu PAD.

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya peneliti ini akan melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi, terhadap PAD di DIY, dengan Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Yi = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

Y adalah PAD (ribu rupiah)

X1 adalah jumlah penduduk (jiwa)

X2 adalah produk domestik regional bruto (juta rupiah)

X3 adalah pengeluaran pemerintah (ribu rupiah)

X4 adalah investasi (juta rupiah)

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah koefisien regresi

e adalah standart error

4.1 Hasil dan Analisis Data

4.1.1 Pemilihan Model Regresi

Regresi data panel mempunyai tiga model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effects, Fixed Effects dan Random Effects Model*. Adapun untuk memilih model mana yang tepat digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan Chow *test* dan Hausman *test*. Hasil uji pemilihan model sebagai berikut:

4.1.1.1 *Chow Test (uji F-statistik)*

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *Common Effects* dengan model *Fixed Effects* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

Uji pemilihan estimasi *Common Effects* atau estimasi *Fixed Effects* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan (≤ 5%) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effects*. Sedangkan apabila *p-value* tidak signifikan (≥ 5%) maka model yang digunakan adalah model *Common Effects*.

Alat analisis menggunakan Eviews 7 dapat mempermudah dengan melakukan *Redundant Fixed Effects-Likehood Ratio Test*/uji *Redundant Fixed Effects* untuk mendapatkan nilai F statistik dan nilai chi-squarenya.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Chow *Test*

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section and period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.306140	(4,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.734509	4	0.0000

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai probabilitas F test maupun Chi-square signifikan dengan p-value 0,0000 ≤ α 5%, yang berarti dengan demikian diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga menolak H_0 dan menerima H_1, kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah bahwa model *Fixed Effects* lebih baik dari *Common Effects*, maka model estimasi yang sesuai untuk menganalisa adalah model *Fixed Effects*.

4.1.1.2 Hausman *Test*

Hausman *test* digunakan untuk menentukan antara model *Fixed Effects* dan model *Random Effects*, untuk melakukan Hausman *Test* maka dapat melihat dari nilai *P-value*. Apabila *p-value* signifikan (≤ 5%) maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan (≥ 5%), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effects.*

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hausman *Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.008144	4	0.0000

Tabel 4.2 menunjukkan nilai statistik uji Hausman memiliki probabilitas 0,0000 $\leq \alpha$ 5%, yang berarti intersep untuk semua unit *Cross Section* tidak sama/berbeda, sehingga menolak H_0 dan menerima H_1, dengan demikian metode estimasi *Fixed Effects* lebih baik digunakan daripada metode *Random Effects.*

Kesimpulan dalam pengujian ini (Uji Chow dan Hausman *Test*) didapatkan model yang terbaik yakni model *Fixed Effects*, sehingga model dengan jenis pendekatan *Fixed Effects* layak sebagai pengujian model.

4.1.2 Estimasi *Fixed Effect* Model (FEM)

Hasil pengolahan regresi data panel dengan model *fixed effects* pada tabel 4.3 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.980792, yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 98,07% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

Hasil regresi model *fixed effects*, diperoleh hasil sebagai berikut:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

$Y = -477.10^8 - 37.88646\ X1 + 153.9610\ X2 - 0.067343\ X3 + 38.67770\ X4$

$R^2 = 0.980792$, N = 35, F statistik = 72.94468

Tabel 4.3
Hasil Uji *Fixed Effects* Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/23/16 Time: 12:54
Sample: 2007 2013
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.77E+08	1.38E+08	-3.470664	0.0024
X1	-37.88646	65.27814	-0.580385	0.5681
X2	153.9610	34.60999	4.448455	0.0002
X3	-0.067343	0.046773	-1.439779	0.1654
X4	38.67770	18.88357	2.048220	0.0539

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.980792	Mean dependent var	1.30E+08
Adjusted R-squared	0.967346	S.D. dependent var	1.06E+08
S.E. of regression	19156099	Akaike info criterion	36.67167
Sum squared resid	7.34E+15	Schwarz criterion	37.33825
Log likelihood	-626.7542	Hannan-Quinn criter.	36.90177
F-statistic	72.94468	Durbin-Watson stat	1.753429
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.4
Hasil Estimasi Intersep di Kabupaten/Kota

Kabupaten	CROSSID	Intersep	C	Konstanta
Kulon Progo	1	3.111	-4.778	-166.700.000
Bantul	2	0.649	-4.778	-412.900.000
Gunung Kidul	3	0.907	-4.778	-387.100.000
Sleman	4	-2.811	-4.778	-758.900.000
Yogyakarta	5	-1.867	-4.778	-664.500.000

Hasil regresi *fixed effects* menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai negatif. Nilai negatif tidak menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama nilai slope tidak nol, koefisien negatif pada umumnya terjadi jika ada rentang waktu yang cukup jauh antara variabel X dan variabel Y, pada dasarnya regresi digunakan untuk memprediksi variabel Y berdasarkan nilai perubahan variabel X, maka yang menjadi perhatian adalah variabel X bukan nilai koefisien (Hendry, 2014).

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa PAD tertinggi di Kabupaten Sleman sebesar Rp.758.900.000, kemudian PAD setelah Kabupaten Sleman adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp.664.500.000, lalu Kabupaten Bantul sebesar Rp.412.900.000, setelah itu Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp.387.100.000 dan PAD yang terendah di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.166.700.000.

4.1.3 Hasil Uji Statistik

4.1.3.1 Hasil Uji t

Uji t statistik dapat dilakukan dengan uji satu sisi dengan $\alpha = 5\ \%$. Jika nilai t hitung > nilai t tabel berarti H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai t hitung < nilai t tabel berarti H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan α : 5 %, n: 35, t-tabel = (α, n-k), k = 4

1. Pengaruh variabel PDRB terhadap variabel PAD adalah:

   H0 : $\beta 1 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap variabel PAD

   H1 : $\beta 1 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap variabel PAD

Variabel PDRB mempunyai nilai t-statistik > t-tabel sebesar (4.448 > 1.697) maka H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.

2. Pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD adalah:

   H0 : $\beta 2 \geq 0$, artinya tidak ada pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD

   H1 : $\beta 2 < 0$, artinya terdapat pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD.

Variabel investasi mempunyai nilai t-statistik > t-tabel sebesar (2.048 > 1.697), maka H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap PAD.

Tabel 4.5
Kesimpulan Hasil Uji t Statistik

Variabel	Prob	t-statistik	t-tabel	Keterangan
X1	0.5681	-0.580385	1.697	tidak signifikan
X2	0.0002	4.448455	1.697	Signifikan
X3	0.1654	-1.439779	1.697	tidak signifikan
X4	0.0539	2.048220	1.697	Signifikan

4.1.3.2 Hasil Uji F

Uji F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, atau melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama, dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel, F-tabel = (α : k-1, n-k), α = 0,05 (4-1 = 3; 35-4 = 31).

Hasil perhitungan yang didapat adalah F hitung = 72.94468, sedang F tabel = 2.92. Hasil perbandingan antara F hitung dan F tabel, menunjukkan nilai F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel PAD.

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu alat ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi, dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effects* Model menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.980792 yang berarti bahwa sebanyak 98,07% variasi atau perubahan pada PAD di Provinsi DIY dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 1,93% dijelaskan oleh sebab lain, di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.4 Interpretasi Hasil

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel menggunakan metode *fixed effects*. Persamaan hasil estimasi sebagai berikut:

$$Y = -4.778 - 37.88646\ X1 + 153.9610\ X2 - 0.067343\ X3 + 38.67770\ X4$$

Keterangan:

Y adalah PAD (ribu rupiah)

X_1 adalah jumlah penduduk (jiwa)

X_2 adalah PDRB (juta rupiah)

X_3 adalah pengeluaran pemerintah (ribu rupiah)

X_4 adalah investasi (juta rupiah)

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan koefisien variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY sebesar 153.9610, artinya ketika PDRB naik sebesar 1 juta maka PAD akan naik sebesar 153.9610 juta. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel PDRB diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Koefisien variabel investasi memiliki pengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY sebesar 38.67770, artinya ketika investasi naik sebesar 1 juta maka PAD akan naik sebesar 38.67770 juta. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa variabel investasi diduga berpengaruh positif terhadap PAD.

4.1.5 Analisis Ekonomi

4.1.5.1 Jumlah Penduduk

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY, karena penduduk yang besar dalam perencana pembangunan dipandang sebagai *asset* modal dasar pembangunan, tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan, apabila jumlah penduduk semakin besar tetapi struktur, persebarannya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, maka akan menjadi beban didaerahnya tersebut. Adanya peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh terjadinya pengembangan faktor yang mempengaruhi peningkatan penduduk seperti kelahiran, migrasi, kawin dan mobilitas sosial, pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita akan tetapi

apabila pertambahan penduduk semakin banyak, oleh karenanya pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Hal tersebut didukung oleh penelitan Adriani (2008), yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk hubungannya negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap PAD di kabupaten Merangin.

4.1.5.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hasil regresi menunjukkan bahwa PDRB positif dan berpengaruh signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Peningkatan PDRB menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Semakin besar PDRB yang diterima, maka semakin besar pula realisasi PAD yang diterima oleh suatu kabupaten/kota di Provinsi DIY. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Semakin meningkatnya pendapatan, maka masyarakat cenderung mendorong pembangunan industri maupun infrastruktur lainnya. pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan PDRB. Pada tahun 2007-2013, PDRB di Provinsi DIY terus mengalami kenaikan khususnya didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta pengembangan tempat wisata maupun industri (BPS Provinsi DIY, 2013). Semakin berkembangnya usaha perdagangan, hotel dan restoran maka PDRB di Provinsi DIY akan mengalami peningkatan. Selain itu, seiring dengan peningkatan PDRB, berkembangnya usaha perdagangan, hotel, dan restoran juga akan

meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD melalui besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima dari PDRB yang meningkat setiap tahunnya, akan berpengaruh terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya PAD yang diterima akan meningkatkan APBD di sisi Pendapatan Daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung ataupun pembiayaan daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitan Gitaningtyas (2014) bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

4.1.5.3 Pengeluaran Pemerintah

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah berasal dari PAD. Hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Menurut Mangkoesoebroto (2008) menunjukkan bahwa

pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat cederung menghindari membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Tahun 2013 menunjukkan bahwa tunggakan pajak terbesar terjadi di Kabupaten Sleman sebesar Rp. 175 Miliar, sedangkan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul masing-masing sebesar Rp. 78,64 Miliar, Rp. 58,18 Miliar, Rp. 17,69 Miliar, dan Rp. 17,31 Miliar. Kabupaten Sleman memiliki tunggakan pajak yang paling besar karena daerah ini memiliki objek pajak yang lebih banyak lantaran wilayahnya yang luas. Selain itu nilai jual objek pajak (NJOP) juga tinggi dibandingkan daerah lain karena seiring tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Secara keseluruhan DIY mengalami tunggakan pajak Rp. 346 Miliar, yang didominasi dari PBB sebesar Rp. 208 Miliar dan PPN Rp. 138 Miliar.

Suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikan pemungutan pajak secara semena-mena. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi, yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak bisa

meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Maulyana (2012) bahwa pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap PAD di Kota Makassar.

4.1.5.4 Investasi.

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY. Tingginya minat investasi maka secara otomatis meningkatkan jumlah perdagangan, hotel dan restoran serta pengembangan tempat-tempat wisata yang menunjukkan masih besarnya minat investor untuk berinvestasi, sehingga meningkatkan PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY melalui penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Selain itu pendapatan daerah tinggi karena besarnya pendapatan masyarakat, maka permintaan akan barang dan jasa akan semakin tinggi dan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Peningkatan investasi mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas yang menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan meningkatkan PAD. Hal tersebut didukung oleh penelitan Gitaningtyas (2014) bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

4.1.5.5 Jumlah Wisatawan

Peneliti mencoba mengganti variabel jumlah penduduk dengan variabel jumlah wisatawan maka hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak

berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota se-Provinsi DIY, karena jumlah wisatawan dalam negeri dan luar negeri tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD hal ini disebabkan oleh kurang usaha dari pemerintah daerah dalam menggalakan promosi kepariwisataan, kurangnya penataan yang baik di objek wisata serta kurangnya pemerintah dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kepariwisataan. Permasalahan dalam aspek regulasi menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas yang masih rendah, tata ruang dan penggunaan lahan yang masih menghambat dan memunculkan konflik, permasalahan aspek sumber daya manusia seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas di sektor pariwisata, lalu kreativitas pengelolaan objek wisata terutama objek yang dikelola pemerintah, serta terdapat pembeda antara kabupaten dan kota berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini tercermin dalam lampiran 14.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan apabila jumlah penduduk semakin besar tetapi struktur, persebarannya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, maka akan menjadi beban didaerah tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap PAD.
2. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan peningkatan PDRB menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah, semakin besar PDRB yang diterima, maka semakin besar pula realisasi PAD yang didapat.
3. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat cenderung menghindari membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY Tahun 2013 menunjukkan bahwa tunggakan pajak terbesar terjadi di Kabupaten

Sleman sebesar Rp. 175 Miliar, sedangkan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul masing-masing sebesar Rp. 78,64 Miliar, Rp. 58,18 Miliar, Rp. 17,69 Miliar, dan Rp. 17,31 Miliar. Kabupaten Sleman memiliki tunggakan pajak yang paling besar karena daerah ini memiliki objek pajak yang lebih banyak lantaran wilayahnya yang luas. Selain itu nilai jual objek pajak (NJOP) juga tinggi dibandingkan daerah lain karena seiring tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Secara keseluruhan DIY mengalami tunggakan pajak Rp. 346 Miliar, yang didominasi dari PBB sebesar Rp. 208 Miliar dan PPN Rp. 138 Miliar. Sehingga pengeluaran pemerintah daerah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

4. Variabel investasi berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan tingginya minat investasi maka secara otomatis meningkatkan jumlah kegiatan perdagangan, hotel dan restoran serta pengembangan tempat-tempat wisata, yang dapat menambah pemasukan daerah tersebut sehingga berpengaruh terhadap PAD.

5.2 Implikasi dan Saran:

1. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan struktur dan persebarannya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah, maka pemerintah daerah provinsi DIY harus membuat regulasi yang tepat agar masyarakat mau dan mampu membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, bahwa dengan meningkatnya PDRB, maka PAD akan meningkat pula, sehingga program-program pembangunan dapat tercapai dan mendorong peningkatan terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas yang berada di kabupaten/kota Provinsi DIY.
3. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD dikarenakan pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, baik dari segi belanja langsung maupun tidak langsung. Sehingga pengeluaran pemerintah tidak dapat meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Hal ini pemerintah diharapkan meninjau kembali pengeluaran yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan dari segi pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, perlu perhatian dari pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memaksimalkan PAD.
4. Investasi berpengaruh positif terhadap PAD, investasi merupakan salah satu ujung tombak dalam menggerakan perekonomian di DIY sehingga PAD dapat

meningkat, karena peran investasi yang dominan di era global maka pemerintah perlu meningkatkan dari segi perencanaan, pengelolaan serta pelayanan yang maksimal terhadap calon investor.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani. (2008), "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8 No. 2. Universitas Batanghari Jambi.

Arsyad, Lincolin. (1999), Ekonomi Pembangunan Edisi Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta.

Atmaja. A. E. (2011), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Asmuruf, M. F. dkk. (2015), "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong ". Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Volume 15 No. 5.

Bintoro, Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja. (1998), Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Cetakan Keenam. Jakarta. Haji Mas Agung.

Boediono. (1998), Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2007–2013. DIY dalam angka. Badan Pusat Statistik, Yogyakarta.

Budiharjo, Ari. (2003), "Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Infasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah". Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak Diterbitkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2013. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gitaningtyas, K.Y dan Taufik Kurrohman. (2014). "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur." Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. Jawa Timur.

Gujarati, Damodar N Dan Dawn C Porter. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1 Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.

Hendry. (2014), Konstanta Negatif…Bagaimana?, Diambil 21 Oktober 2016, https://teorionline.wordpress.com/2014/06/24/konstanta-intercept-negatif-bagaimana/.

Iqbal, Muhammad. (2015), Regresi Data Panel (2) Tahap Analisis. Diambil 31 Agustus 2016. https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/.

Kapantow G.H.M. dkk. (2015), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal Lagarense. 6 (3): 1-12.

Kuncoro, Mudrajad. (2012), Mudah Memahami dan Menganalisis: Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kusuma, P. A. (2014). "Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD 33 Provinsi Di Indonesia". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Maulyana, Asrah. (2012). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Periode 2000-2009". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanudin. Makassar.

Mardiasmo. (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mangkoesoebroto, Guritno. (2008). Ekonomi Publik Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.

Novianto, Fajar Trias. (2013). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2001".

Novita, Elfryanty. (2016), Selayang Pandang: Produk Domestik Regional Bruto dan Maknanya Dalam Perekonomian Papua Barat, Diambil 25 April 2016, http://elfreedreams.blogspot.co.id/2016/01/selayangpandangprodukdomestik.htm produkdomestik.html.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Purwaningsih, Esti. (2011), "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008". Tesis. Pasca Sarjana Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Rustiono, Deddy. (2008), "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah". Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Santoso, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu.(2005), "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.2. No.1 / Juli 2005: 9-18.

Satriya, H.E. (2009), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2006". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Sriyana. Jaka. (2014), Metode Regresi Data Panel, Ekonisia, Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. (1994), Pengantar Makroekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____. (2000), Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka.

_____. (2004), Makro Ekonomi. Teori Pengantar. Cetakan Ke limabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sunariyah. (2004), Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keempat. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

_____(2003), Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta. (UPP) AMP YKPN.

Suparmoko, M. (2001), Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama.Andi. Yogyakarta.

_____. (2002), Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.

Suryono, W. B. (2008). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah". Skripsi.

Todaro, M, P. (2000), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh). Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Dasar No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 9 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Widarjono, Agus. (2007), Ekonometrika Teori Dan Aplikasi. Ekonisia. FE UII.Yogyakarta.

_____. (2009), Ekonometrika Teori Dan Aplikasi. Ekonisia. FE UII.Yogyakarta.

_____. (2013), Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya: Disertai Panduan Eviews. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Widodo, HG Suseno Triyanto. (1990), Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia.Kanisius. Yogyakarta.

Wirosardjono, Sucipto. (1998), Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa, Prisma. No 3 Tahun XVII.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data PAD per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(ribu rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				
	Kulon Progo	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Sleman**	**Kota Yogya**
2007	38.637.821	57.229.726	28.878.357	120.951.408	114.098.351
2008	36.187.000	48.426.000	25.239.543	140.631.359	119.300.781
2009	39.358.629	88.691.363	38.455.405	157.231.268	161.482.659
2010	48.589.685	81.637.099	42.542.031	163.056.459	179.423.640
2011	53.752.294	128.896.456	54.462.419	226.686.250	228.870.562
2012	74.028.664	166.597.778	67.050.782	301.069.539	338.839.606
2013	95.991.513	224.197.864	83.427.448	449.270.306	383.052.140

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 2

Data jumlah penduduk per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk				
	Kulon Progo	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Sleman**	**Kota Yogya**
2007	384.326	872.866	675.359	1.035.032	391.821
2008	385.937	886.061	675.471	1.054.751	390.783
2009	387.493	899.312	675.474	1.074.673	389.685
2010	388.869	911.503	675.382	1.093.110	388.627
2011	390.207	921.263	677.998	1.107.304	390.553
2012	393.221	927.958	684.740	1.114.833	394.012
2013	394.155	943.659	681.936	1.139.438	391.032

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 3

Data jumlah wisatawan per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(jiwa)

Tahun	Jumlah Wisatawan				
	Kulon Progo	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Sleman**	**Kota Yogya**
2007	235.962	1.050.065	309.662	1.691.274	1.962.775
2008	547.024	1.417.253	416.406	2.336.900	2.494.661
2009	425.098	1.261.211	529.541	3.243.436	2.891.662
2010	429.357	1.287.280	548.857	2.416.927	3.535.024
2011	545.743	1.816.581	688.381	2.827.900	3.463.638
2012	609.730	2.355.717	1.000.387	2.503.597	3.331.639
2013	1.026.321	2.153.404	1.337.438	1.946.902	4.153.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 4

Data PDRB ADHK 2000 per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(juta rupiah)

TAHUN	Produk Domestik Regional Bruto				
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogya
2007	1.587.630	3.448.948	2.941.288	5.553.580	4.776.401
2008	1.662.370	3.618.060	3.070.298	5.838.246	5.021.149
2009	1.728.304	3.779.948	3.197.365	6.099.557	5.244.851
2010	1.781.227	3.967.928	3.330.080	6.373.200	5.505.942
2011	1.869.338	4.177.201	3.474.288	6.704.100	5.816.568
2012	1.963.028	4.400.313	3.642.562	7.069.229	6.151.679
2013	2.062.182	4.645.476	3.825.350	7.471.898	6.498.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 5

Data pengeluaran pemerintah per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(ribu rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah				
	Kulonprogo	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Sleman**	**Kota Yogya**
2007	523.362.177	715.598.142	626.807.566	789.513.421	626.227.188
2008	565.532.615	1.040.092.602	688.458.133	881.023.665	750.941.918
2009	594.404.633	888.818.903	740.030.116	939.638.240	824.037.523
2010	596.292.274	915.091.018	776.960.886	1.028.576.357	847.138.308
2011	682.291.108	908.389.354	929.749.694	1.376.859.031	889.772.129
2012	834.118.055	1.198.030.646	1.075.636.625	1.383.011.982	902.295.612
2013	935.369.836	1.355.174.641	1.236.639.665	1.733.223.826	1.134.964.780

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 6

Data investasi per kabupaten/kota Provinsi DIY
Tahun 2007-2013
(juta rupiah)

Tahun	Investasi				
	Kulon Progo	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Sleman**	**Kota Yogya**
2007	28.559	164.905	77.523	1.747.925	2.060.788
2008	29.819	183.861	77.523	1.848.630	2.082.055
2009	32.185	220.461	88.815	1.964.030	2.085.155
2010	32.185	244.151	107.179	2.055.669	2.137.040
2011	36.970	378.282	130.001	3.415.269	2.464.252
2012	37.096	417.262	131.843	3.518.179	2.951.686
2013	37.095	467.278	131.842	3.962.346	3.469.206

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta, dalam BPS DIY

Lampiran 7
Hasil Pengujian Chow *Test*

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section and period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.306140	(4,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.734509	4	0.0000

Lampiran 8
Hasil Pengujian Hausman *Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.008144	4	0.0000

Lampiran 9
Hasil Uji *Fixed Effects* Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/23/16 Time: 12:54
Sample: 2007 2013
Periods included: 7
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.77E+08	1.38E+08	-3.470664	0.0024
X1	-37.88646	65.27814	-0.580385	0.5681
X2	153.9610	34.60999	4.448455	0.0002
X3	-0.067343	0.046773	-1.439779	0.1654
X4	38.67770	18.88357	2.048220	0.0539

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.980792	Mean dependent var	1.30E+08
Adjusted R-squared	0.967346	S.D. dependent var	1.06E+08
S.E. of regression	19156099	Akaike info criterion	36.67167
Sum squared resid	7.34E+15	Schwarz criterion	37.33825
Log likelihood	-626.7542	Hannan-Quinn criter.	36.90177
F-statistic	72.94468	Durbin-Watson stat	1.753429
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10
Hasil Estimasi Intersep di Kabupaten/Kota

Kabupaten	CROSSID	Intersep	C	Konstanta
Kulon Progo	1	3.111	-4.778	-166.700.000
Bantul	2	0.649	-4.778	-412.900.000
Gunung Kidul	3	0.907	-4.778	-387.100.000
Sleman	4	-2.811	-4.778	-758.900.000
Yogyakarta	5	-1.867	-4.778	-664.500.000

Lampiran 11
Hasil Uji t Statistik

Variabel	Prob	t-statistik	t-tabel	Keterangan
X1	0.5681	-0.580385	1.697	tidak signifikan
X2	0.0002	4.448455	1.697	Signifikan
X3	0.1654	-1.439779	1.697	tidak signifikan
X4	0.0539	2.048220	1.697	Signifikan

Lampiran 12
PAD kabupaten/kota Se-Provinsi DIY Tahun 2013
(ribu Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	95.991.513
2.	Bantul	224.197.864
3.	Gunung Kidul	83.427.448
4.	Sleman	449.270.306
5.	Kota Yogyakarta	383.052.140

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 13
PDRB kabupaten/kota Se-Provinsi DIY Tahun 2013
ADHK 2000
(juta Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	2.062.182
2.	Bantul	4.645.476
3.	Gunung Kidul	3.825.350
4.	Sleman	7.471.898
5.	Kota Yogyakarta	6.498.900

Lampiran 14
Hasil Uji Fixed Effect Model Baru

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/18/16 Time: 19:40
Sample: 2007 2013
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-43.03694	6.910566	-6.227701	0.0000
LOG(X1?)	-0.061989	0.094912	-0.653125	0.5194
LOG(X2?)	4.046806	0.768168	5.268129	0.0000
LOG(X3?)	-0.168189	0.245279	-0.685706	0.4990
LOG(X4?)	0.344609	0.173537	1.985795	0.0577
Fixed Effects (Cross)				
_KULONPROGO--C	3.154815			
_BANTUL--C	-0.001730			
_GUNUNGKIDUL--C	0.167372			
_SLEMAN--C	-1.935217			
_YOGYA--C	-1.385240			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.983176	Mean dependent var	18.40419
Adjusted R-squared	0.978000	S.D. dependent var	0.779253
S.E. of regression	0.115582	Akaike info criterion	-1.260642
Sum squared resid	0.347338	Schwarz criterion	-0.860695
Log likelihood	31.06123	Hannan-Quinn criter.	-1.122580
F-statistic	189.9320	Durbin-Watson stat	2.324228
Prob(F-statistic)	0.000000		

Keterangan:

Log X1 adalah Jumlah Wisatawan
Log X2 adalah Jumlah PDRB
Log X3 adalah Pengeluaran Pemerintah
Log X4 adalah Investasi